

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA KOTA KEDIRI SEBELUM DAN SESUDAH  
OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**YESSICA ADIGUNA PAHLAWI**  
**0513010314/FE/EA**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2011**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA KEDIRI SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH**

yang diajukan :

**YESSICA ADIGUNA PAHLAWI**  
**0513010314/FE/EA**

disetujui untuk ujian lisan oleh

**Pembimbing Utama**

**Drs. Ec. Syafi'i, AK, MM**

**Tanggal : .....**

**Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi**

**Drs. Ec. H. R.A. Suwaidi, MS**  
**NIP. 196003301986031003**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul : **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kota Kediri Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah”** dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di Surabaya.

Sejak adanya ide sampai tahap penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H. Dhani Ichsanudin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Ec. Syafi'i, AK, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan dan saran untuk penulis.
5. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

6. Para Staf dan Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda dan Ayahanda yang tercinta, serta saudara dan keluarga besar, tiada kata yang bisa ananda ucapkan, selain kata terima kasih yang sebanyak - banyaknya, karena beliaulah yang selama ini telah memberi dorongan semangat baik material maupun spiritual, dan memberikan curahan kasih sayang sampai skripsi ini selesai.
8. Specially for my little angel from heaven, who lives my life.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah mereka berikan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dengan terbatasnya pengalaman serta kemampuan, memungkinkan sekali bahwa bentuk maupun isi skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang mengarah kepada kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai penutup penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan kecil yang berguna bagi masyarakat, almamater, dan ilmu pengetahuan.

Surabaya,        Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I    PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6

### **BAB II   TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Landasan Teori .....	10
2.2.1. Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.2.2. Otonomi Daerah.....	11
2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	14
2.2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2.2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2.2.4.2. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah.....	17
2.2.4.3. Usaha – Usaha Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	19

2.2.5. Kinerja Keuangan Daerah.....	22
2.2.6. Laporan Keuangan Daerah.....	24
2.2.6.1. Jenis Laporan Keuangan Daerah .....	24
2.2.6.2. Pemakai Laporan Keuangan Daerah.....	25
2.2.6.3. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .	26
2.2.7. Analisis Rasio Keuangan .....	26
2.2.7.1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan .....	26
2.2.7.2. Jenis – Jenis Analisis Rasio Keuangan Pada APBD .....	28
2.2.5. Desentralisasi .....	33
2.3. Kerangka Pikir .....	34
2.4. Hipotesis .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	38
3.2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.....	39
3.2.1. Populasi.....	39
3.2.2. Sampel.....	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.3.1. Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3.2 Pengumpulan Data .....	41
3.4. Teknik Analisis Dan Pengujian Hipotesis .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	42
4.4.1. Sejarah Kota Kediri.....	44
4.4.2. Misi, Visi Kota Kediri.....	46

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
4.3. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis .....	50
4.4. Pembahasan .....	52
4.4.1. Implikasi .....	52
4.4.2. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya.....	54
4.4.3. Konfirmasi Hasil Penelitian Dengan Tujuan Dan Manfaat.....	54
4.4.4. Keterbatasan Penelitian.....	55

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel. 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri	
Periode 5 (lima) Tahun Sebelum dan 5 Tahun Sesudah	
Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah Tahun 2004.....	4
Tabel. 2.1. Laporan Surplus Defisit Anggaran Pemerintah Daerah	
Untuk Periode 31 Desember 20XX.....	23
Tabel. 4.1. Rekapitulasi Data “Rasio Kemandirian”	
Periode 5 (lima) Tahun Sebelum dan 5 Tahun Sesudah	
Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah Di Kota Kediri.....	47
Tabel. 4.2. Rekapitulasi Data “Rasio Pertumbuhan”	
Periode 5 (lima) Tahun Sebelum dan 5 Tahun Sesudah	
Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah Di Kota Kediri.....	48
Tabel. 4.3. Rekapitulasi Data “Tingkat Desentralisasi Fiskal”	
Periode 5 (lima) Tahun Sebelum dan 5 Tahun Sesudah	
Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah Di Kota Kediri.....	49
Tabel. 4.4. Hasil Uji Beda Dua Rata – Rata Sampel Berpasangani.....	50
Tabel. 4.5. Hasil Uji Beda Dua Rata – Rata Sampel Berpasangani.....	51
Tabel. 4.6. Hasil Uji Beda Dua Rata – Rata Sampel Berpasangani.....	52



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 2.1. Diagram Kerangka Pikir.....	35

# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA KEDIRI SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH**

**Oleh :**

**YESSICA ADIGUNA PAHLAWI**

## **Abstrak**

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai macam permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah (pemerintah daerah), yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Sejalan dengan dikeluarkannya UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua UU di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya dapat digunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan tingkat desentralisasi fiskal pada Kota Kediri antara sebelum diberlakukannya hak otonomi daerah dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri untuk tahun anggaran 5 (lima) tahun sebelum diberlakukannya hak otonomi daerah (1999 – 2003) sampai dengan 5 (lima) tahun sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah (2005 – 2009), dan data yang digunakan tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Jawa Timur. Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata – Rata Sampel Berpasangan

Dari hasil Uji analisis dan Uji Hipotesis dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan tingkat desentralisasi fiskal pada Kota Kediri antara sebelum diberlakukannya hak otonomi daerah dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah, sehingga hipotesis yang diajukan tidak teruji kebenarannya.

**Keyword : Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan dan Tingkat Desentralisasi Fiskal**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai macam permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah (pemerintah daerah), yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua UU di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya dapat digunakan analisis rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. (Halim, 2002: 127)

Menurut Widodo seperti yang telah dikutip oleh Halim (2002: 128), ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan dan Tingkat Desentralisasi Fiskal.

Rasio Kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman. (Halim, 2002: 128). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pusat dan propinsi) semakin rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2003) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Selanjutnya Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah tercapai dari periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan. (Halim, 2002: 129). Semakin tinggi rasio pertumbuhan mengandung arti bahwa pemerintah daerah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan sumber – sumber pendapatan daerah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Indrawati (2003) membuktikan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Tingkat Desentralisasi Fiskal menunjukkan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga

seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. (Hariyadi 2002: 237). Semakin tinggi tingkat Desentralisasi Fiskal mengandung arti bahwa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, dengan harapan dapat mendorong efisiensi sektor publik, akuntabilitas publik dan transparansi dalam menyediakan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2003) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan desentralisasi fiskal antara sebelum dan sesudah berlakunya Undang – Undanh hak otonomi daerah.

Dari data yang diperoleh dari Kabupaten Kediri mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara sebelum dan sesudah berlakunya UU otonomi daerah, dapat disajikan pada tabel 1.1, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri  
Periode 5 (lima) Tahun Sebelum dan 5 Tahun Sesudah  
Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah Tahun 2004**

Pendapatan Asli Daereh Kota Kediri			
Sebelum Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah		Sesudah Diberlakukannya Hak Otonomi Daerah	
1999	6.336.923,00	2005	40.135.033,00
2000	7.871.025,00	2006	52.905.244,00
2001	13.704.520,00	2007	54.473.977,00
2002	12.182.314,00	2008	61.072.155,00
2003	26.209.849,00	2009	70.462.352,00

**Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010**

Dari tabel 1.1, menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat pendapatan asli daerah pada Kota Kediri sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah. Fenomena ini membuktikan bahwa dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata membawa nuansa baru Pemerintahan Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan untuk

menyelenggarakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi keanekaragaman Daerah.

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kota Kediri Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan rasio kemandirian pada kota Kediri antara sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pada Kota Kediri antara sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat desentralisasi fiskal pada Kota Kediri antara sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan rasio kemandirian pada Kota antara sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah.
2. Untuk membuktikan adanya perbedaan rasio pertumbuhan pada Kota Kediri antara sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah.
3. Untuk menganalisis adanya perbedaan tingkat desentralisasi fiskal pada Kota Kediri antara sebelum dan sesudah diberlakukannya hak otonomi daerah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah kongkrit untuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat, serta dapat menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.



### 3. Bagi Pihak Lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanah perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah yang ada.